



# **LAPORAN KEUANGAN**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**

**Untuk periode yang berakhir  
31 Desember 2023**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan KPKNL Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jayapura. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Dadang Eko Darminto



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
Lampiran dan Daftar	45



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JAYAPURA**

Gedung Keuangan Negara Jayapura, JL. A. Yani No.8, Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura  
Utara, Kota Jayapura  
Telepon : 0967-534641 Faksimili : 0967-536827, Email kpknjayapura11@gmail.com

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2023 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Dadang Eko Darminto



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan IV TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.196.360.065 atau mencapai 113% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp 5.503.317.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 2.062.284.617 atau mencapai 90% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.291.409.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per Triwulan IV 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.523.900.763 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 92.954.975; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.430.945.788; dan Aset Lainnya sebesar Rp 157.750.000

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.693.882 dan Rp 5.522.206.881.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.196.360.065 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2.087.950.952 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4.108.409.113.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 4.108.409.113.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp5.519.602.550 ditambah Surplus-LO sebesar Rp4.108.409.113 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.105.804.782, sehingga terdapat kenaikan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp2.604.331.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAYAPURA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

*(Dalam Rupiah)*

CATATAN	Triwulan IV TA 2023			Triwulan IV TA 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg
B.1	5,503,317,000	6,196,360,065	113	4,403,845,000	11,383,281,316	258
	<b>5,503,317,000</b>	<b>6,196,360,065</b>	<b>113</b>	<b>4,403,845,000</b>	<b>11,383,281,316</b>	<b>258</b>
B.2.						
B.3	-	-		-	-	
B.4	1,935,010,000	1,718,285,617	89	1,695,331,000	1,509,752,981	89
B.5	356,399,000	343,999,000	97	-	-	0
	<b>2,291,409,000</b>	<b>2,062,284,617</b>	<b>90</b>	<b>1,695,331,000</b>	<b>1,509,752,981</b>	<b>89</b>
	<b>2,291,409,000</b>	<b>2,062,284,617</b>	<b>90</b>	<b>1,695,331,000</b>	<b>1,509,752,981</b>	<b>89</b>

**II. NERACA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAYAPURA**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2023 dan 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dan Setara Kas		
Piutang PNB		
Bagian Lancar TP/TGR		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		
Belanja Dibayar di Muka	12,500,000	12,500,000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		
Persediaan	80,454,975	121,186,500
Jumlah Aset Lancar	92,954,975	133,686,500
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		
Tagihan TP/TGR	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	2,564,512,000	2,564,512,000
Peralatan dan Mesin	3,142,218,123	2,856,685,106
Gedung dan Bangunan	2,520,226,000	2,520,226,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2,000,000	2,000,000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,798,010,335)	(2,557,507,056)
Jumlah Aset Tetap	5,430,945,788	5,385,916,050
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	157,750,000	90,900,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(157,750,000)	(90,900,000)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5,523,900,763.00</b>	<b>5,519,602,550.00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Uang Muka dari KPPN		
Utang kepada Pihak Ketiga	1,693,882	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1,693,882	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,693,882</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	5,522,206,881	5,519,602,550
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,522,206,881</b>	<b>5,519,602,550</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5,523,900,763</b>	<b>5,519,602,550</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAYAPURA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	6,196,360,065	11,383,281,316
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>6,196,360,065</b>	<b>11,383,281,316</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	
Beban Persediaan	D.3	123,529,325	78,832,450
Beban Barang dan Jasa	D.4	834,904,217	757,466,042
Beban Pemeliharaan	D.5	165,574,936	169,034,057
Beban Perjalanan Dinas	D.6	636,702,546	428,567,132
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	327,239,928	284,944,200
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	
Beban Lain-lain	D.11	-	
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2,087,950,952</b>	<b>1,718,843,883</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,433</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar		-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		-	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,433</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNBPN		-	
Beban Perjalanan Dinas		-	
Beban Persediaan		-	
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,433</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAYAPURA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>5,519,602,550</b>	<b>5,652,857,697</b>
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	4,108,409,113	9,664,437,435
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	33,878
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	33,878
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(4,105,804,782)	(9,797,726,460)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	2,604,331	(133,255,147)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.7</b>	<b>5,522,206,881</b>	<b>5,519,602,550</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

##### **Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tanggal 30 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuanga Bagian Anggaran 015
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kantor Pelayanan.

### **Profil**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura berkedudukan di Jalan Raya Kelapa Dua Kompleks PTC Entrop, Jayapura, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

### **Rencana Strategis**

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Jayapura berkomitmen dengan visi ***“menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.”*** Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan pelayanan yang baik secara efektif dan efisien kepada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Jayapura.
- Memberikan citra positif sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Papua.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku membawahi 4 (empat) kantor vertical di daerah, yaitu KPKNL Jayapura, KPKNL Biak, KPKNL Sorong, dan KPKNL Ambon.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
  - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
  - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
  - Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
  - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

#### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

#### **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Kriteria Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Penyusutan Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - d. Tanah
  - e. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

Uraian	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.363.000.000	2.363.000.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	12.817.000	12.817.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3.103.000.000	3.103.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.500.000	3.500.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9.000.000	9.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.503.317.000</b>	<b>5.503.317.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.907.828.000	1.935.010.000
Belanja Modal	356.399.000	356.399.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.264.227.000</b>	<b>2.291.409.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp3.079.536.881*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.196.360.065 atau mencapai 113 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.503.317.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura hanya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,500,000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2,363,000,000	1,884,553,346	80
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12,817,000	115,413,291	900
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	150,000	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,103,000,000	4,196,243,428	135
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	12,000,000	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5,503,317,000</b>	<b>6,196,360,065</b>	<b>113</b>

Pada Triwulan IV TA 2023 realisasi pendapatan paling besar terdapat pada pendapatan bea lelang pegadaian sebesar Rp4.196.243.428. Realisasi pendapatan lainnya berasal dari pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I sebesar Rp1.884.553.346, dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp115.413.291.

*Realisasi Belanja Negara  
Rp1.530.647.777*

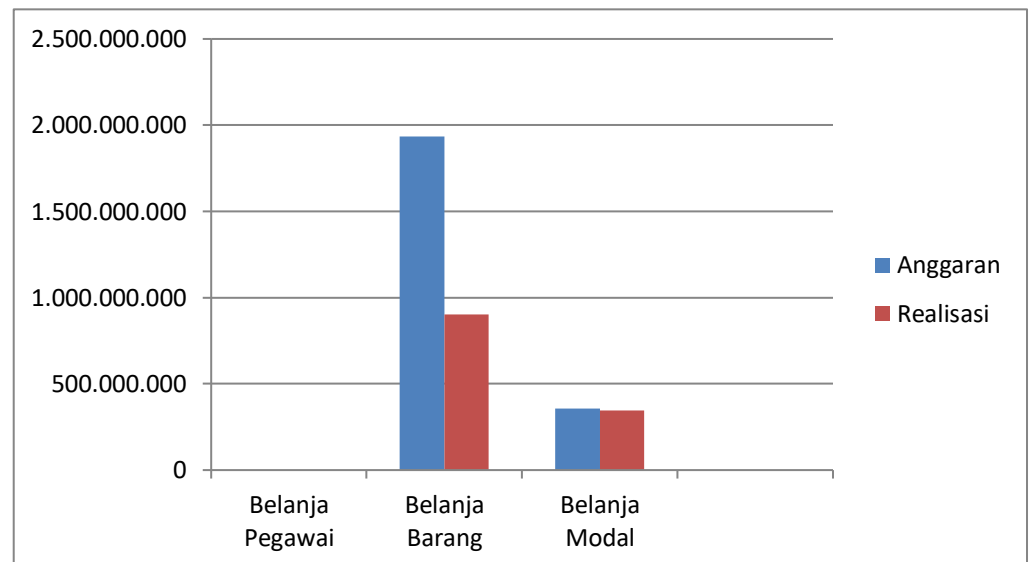
### **B.2. Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada Triwulan IV TA 2023 adalah sebesar Rp1.530.647.777 atau 71 persen dari anggaran belanja setelah revisi yaitu sebesar Rp2.164.227.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Triwulan IV TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,907,828,000	1,718,285,617	64.67
Belanja Modal	356,399,000	343,999,000	96.52
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>2,264,227,000</b>	<b>2,062,284,617</b>	<b>91</b>
Pengembalian Belanja		-	
<b>Jumlah</b>	<b>2,264,227,000</b>	<b>2,062,284,617</b>	<b>91</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2022 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.718.285.617 atau 64,67% dari pagu anggaran sebesar Rp1.695.331.000 dan Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0% dari pagu anggaran sebesar Rp0. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena telah pulihnya situasi setelah pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan oleh seksi teknis dan operasional kantor dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama karena pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran Belanja Modal. Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.718.285.617	1.509.752.981	13,81
Belanja Modal	343.999.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.062.284.617</b>	<b>1.509.752.981</b>	<b>36,60</b>

*Belanja Pegawai  
Rp0*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Realisasi belanja pegawai TA 2023 sama dengan TA 2022, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan sentralisasi Belanja Pegawai.

*Belanja Barang  
Rp1,718,285,617*

### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,718,285,617 dan Rp1,509,752,981. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 13,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2023 sudah lebih kondusif apabila dibandingkan

dengan tahun 2022. Realisasi Belanja Barang TA 2023 sesuai dengan trajektori yaitu sebesar 90% dari pagu anggaran TA 2023, hal ini dikarenakan pulihnya kondisi dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi berjalan lancar karena kegiatan dari seksi teknis dan operasional kantor dapat berjalan sesuai semestinya pada KPKNL Jayapura.

*Tabel 2.7 Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI Triwulan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	714.342.036	696.542.133	2,56
Belanja Barang Non Operasional	58.532.500	15.460.000	278,61
Belanja Barang Persediaan	82.797.800	142.185.750	(41,77)
Belanja Jasa	60.335.799	57.963.909	4,09
Belanja Pemeliharaan	165.574.936	169.034.057	(2,05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	636.702.546	428.567.132	48,57
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.718.285.617</b>	<b>1.509.752.981</b>	<b>13,81</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.718.285.617</b>	<b>1.509.752.981</b>	<b>13,81</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp343.999.000*

### **B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp343.999.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 100% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pada DIPA TA 2022 tidak terdapat anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sehingga tidak terdapat realisasi belanja.

*Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI Triwulan III TA 2023	REALISASI Triwulan III TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.999.000	0	100
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>343.999.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>343.999.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rekening Virtual Account merupakan pengganti dari rekening BRI (0307-01-000108-30-1) karena telah dilakukan penutupan pada rekening tersebut.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Triwulan III TA 2023	Triwulan III TA 2022
Rekening Virtual Account (650095381291000)	-	-
Uang Tunai	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ kan	-	-
Saldo Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0.

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TRIWULAN III TA 2023	TRIWULAN III TA 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp4.0.*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2022 sebesar R600.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Keterangan	TRIWULAN III TA 2023	TRIWULAN III TA 2022
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	-
Biad PPN yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Dana Pihak Ketiga	-	600.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>

*Piutang PNBP Rp0*

#### **C.4 Piutang PNBP**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2023 tidak memiliki piutang PNBP. Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Tabel 3.4 Rincian Piutang PNBP*

Uraian	SEMESTER I TA 2023	SEMESTER I TA 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2023 tidak memiliki Bagian

Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar TPA  
Rp0

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2023 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 0

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2023 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Belanja Dibayar di  
Muka  
Rp12.500.000

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.500.000 dan Rp12.500.000. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 3.6 Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	Triwulan III TA 2023	TRIWULAN III TA 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Arsip	12.500.000	12.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>

Persediaan Rp 0.

### C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jenis	SEMESTER I TA 2023	TRIWULAN I TA 2022
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp67.203.345

### C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp80,454,975 dan Rp121,186,500.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.7 Rincian Persediaan*

Persediaan	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	80.454.975	121.186.500
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>80.454.975</b>	<b>121.186.500</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2020 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0

### C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2020 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Tanah  
Rp.2.564.512.000

### C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jayapura per tanggal 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.564.512.000. Rincian saldo Tanah per 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1000m2	Jalan Lembah Sunyi IV, Angkasapura, Jayapura Utara	2.564.512.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.564.512.000</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp3.076.234.106

#### C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.076.234.106 dan Rp 2.816.535.106. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>2.856.685.106</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	377.299.000
Transfer Masuk	343.999.000
Mutasi kurang:	157.750.000
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>3.076.234.106</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(2.269.529.997)
<b>Nilai Buku Per 30 September 2023</b>	<b>806.704.109</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp 2.520.226.000

#### C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 2.520.226.000 dan Rp2.495.492.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Mutasi Gedung dan Bangunan

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>2.520.226.000</b>
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>2.520.226.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	302.905.182
<b>Nilai Buku Per 30 September 2023</b>	<b>2.217.320.818</b>

#### C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi transaksi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp2.000.000

### C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.000.000. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

Tabel 3.13 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	2.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2022	2.000.000
Akumulasi Penyusutan 30 September 2022	-
Nilai Buku per 30 September 2022	2.000.000

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0.

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

Aset Tak Berwujud  
Rp0

### C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura pada TA 2021 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(2.572.435.179)

### C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp(2,798,010,335)

dan (Rp2,557,507,056). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.564.512.000	-	2.564.512.000
2	Peralatan dan Mesin	3.076.234.106	(2.468.148.368)	608.085.738
3	Gedung dan Bangunan	2.520.226.000	(329.861.967)	2.190.364.033
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	2.000.000	-	2.000.000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>8.162.972.106</b>	<b>-2.798.010.335</b>	<b>5.364.961.771</b>

*Aset Lain-Lain Rp.  
248.650.000*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.750.000 dan Rp90.900.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(248.650.000)*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp Rp(157.750.000) dan Rp(90.900.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp36.000.000*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja

dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp32.312.422.*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1,693,882 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang Yang Belum  
Ditagihkan  
Rp0.*

### **C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum ditagihkan tersebut merupakan transaksi atas UP yang belum diajukan SPM GUP ke KPPN.

*Ekuitas  
Rp5.684.238.108.*

### **C.27 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,522,206,881 dan Rp5,519,602,550. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB  
Rp3.096.847.139*

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6,196,360,065. dan Rp11,383,281,316. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan Triwulan TA 2022*

URAIAN	Triwulan III TA 2023	Triwulan III TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.096.847.139	11.383.281.316	-72,79%
<b>Jumlah</b>	<b>3.096.847.139</b>	<b>11.383.281.316</b>	<b>-72,79%</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, serta Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

*Beban Pegawai  
Rp0*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3 Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan  
Rp106.489.665.*

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp123,529,325 dan Rp 78,832,450. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III 2023	Triwulan III 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	123.529.325	78.832.450	56,70%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>123.529.325</b>	<b>78.832.450</b>	<b>56,70%</b>

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp636.409.166*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp834.904.217 dan Rp757.466.042. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa di TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,209 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.4 Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan III TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III TA 2023	Triwulan III TA 2022
Belanja Pengiriman Surat Dinas dan Pos	45.779.580	51.545.380
Belanja Honor Operasional Satker	123.690.000	117.960.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	61.600.000	64.000.000
Belanja Bahan	58.532.500	15.460.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
Belanja Langganan Telepon	1.442.581	1.172.909
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	34.686.600	76.692.813
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	0	6.791.000
Belanja Keperluan Perkantoran	435.648.373	386.343.940
Belanja Jasa Profesi	9.000.000	0
Belanja Sewa	50.000.000	37.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>820.379.634</b>	<b>757.466.042</b>

*Beban Pemeliharaan Rp152.615.478.*

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp165,574,936 dan Rp169,034,057. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan di TA 2022 mengalami kenaikan 10,291 persen karena adanya pemeliharaan pada kendaraan dinas roda 4. Rincian beban pemeliharaan untuk 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.5 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III TA 2023	Triwulan III TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	10.800.000	0,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.574.936	158.234.057	4,64%
<b>Jumlah</b>	<b>165.574.936</b>	<b>169.034.057</b>	<b>-2%</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp427.642.707.*

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp636,702,546 dan Rp428,567,132. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban

Perjalanan Dinas pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 40% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya karena keadaan, situasi, dan kondisi pandemi sampai dengan pertengahan 2022 yang jauh lebih kondusif apabila dibandingkan pada tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dapat berjalan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Triwulan III TA 2023	Triwulan III TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	576.952.546	391.217.132	47,48%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.750.000	37.350.000	59,97%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>636.702.546</b>	<b>428.567.132</b>	<b>49%</b>

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp168.760.623*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 327,239,928 dan Rp284,944,200. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Trieulan III TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester I TA 2023	Semester I TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	273.326.358	230.927.014	18,36%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.913.570	54.017.186	-0,19%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	-	-	0,00%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>327.239.928</b>	<b>284.944.200</b>	<b>14,84%</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>327.239.928</b>	<b>284.944.200</b>	<b>15%</b>

Surplus / Defisit  
dari Kegiatan Non  
Operasional Rp0

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	Semester I TA 2023	Semester I TA 2022
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>		
Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		
<b>Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya</b>		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu		
<b>Beban dari kegiatan non operasional lainnya</b>		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp5.519.602.550.*

### ***E.1 Ekuitas Awal***

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.519.602.550 dan Rp 5.652.857.697.

*Defisit LO*  
*Rp1.604.929.512.*

### ***E.2 Surplus (Defisit) LO***

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada Triwulan III TA 2032 dan 2022 adalah sebesar Rp4,108,409,113 dan Rp9,664,437,435 Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset Rp0*

### ***E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset***

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian atas aset berupa persediaan yang disebabkan oleh perubahan harga perolehan persediaan. Penyesuaian Nilai Aset berupa persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2032 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai Persediaan Rp0*

### ***E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan***

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Triwulan III TA 2032 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp33.878.

*Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0*

### ***E.3.3 Selisih Revaluasi Aset***

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada TA 2032 dan 2022 pada KPKNL Jayapura adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Aset Tetap*  
*Rp0*

#### ***E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi***

Koreksi Atas Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Serta koreksi karena adanya Reklasifikasi kode barang pada pencatatan di SIMAK-BMN. Koreksi pencatatan aset tetap untuk TA 2032 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Lain-lain*  
*Rp0*

#### ***E.3.5 Koreksi Lain-lain***

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2032 dan 2022 adalah sebesar Rp0.

*Transaksi Antar*  
*Entitas*  
*Rp1.440.293.954.*

#### ***E.4 Transaksi Antar Entitas***

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(4,105,804,782) dan Rp (9,797,726,460).

*Ekuitas Akhir*  
*Rp5.684.238.108.*

#### ***E.5 Ekuitas Akhir***

Nilai Ekuitas pada tanggal TA 2032 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5,522,206,881 dan Rp 5,519,602,550

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

Pada 31 Desember 2023 Pejabat Pengelola Keuangan pada tahun di Lingkup KPKNL Jayapura adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dadang Eko Darminto
Pejabat Pembuat Komitmen	: Irawan Ciputra
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Andy Heriwibowo
Bendahara Pengeluaran	: Setiawan



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 538129

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:19 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>2,291,409,000</b>	<b>2,062,284,617</b>	<b>(229,124,383)</b>	<b>90</b>	<b>1,695,331,000</b>	<b>1,509,752,981</b>	<b>(185,578,019)</b>	<b>89</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAYAPURA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

DADANG EKO DARMINTO  
197405111999031001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2500 ) PAPUA**  
**SATUAN KERJA : ( 538129 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:19 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	12,500,000	12,500,000	0	0.00
Persediaan	80,454,975	121,186,500	(40,731,525)	(33.61)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>92,954,975</b>	<b>133,686,500</b>	<b>(40,731,525)</b>	<b>(30.47)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,564,512,000	2,564,512,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,142,218,123	2,856,685,106	285,533,017	10.00
Gedung dan Bangunan	2,520,226,000	2,520,226,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,000,000	2,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,798,010,335)	(2,557,507,056)	(240,503,279)	9.40
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5,430,945,788</b>	<b>5,385,916,050</b>	<b>45,029,738</b>	<b>0.84</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	157,750,000	90,900,000	66,850,000	73.54
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(157,750,000)	(90,900,000)	(66,850,000)	73.54
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5,523,900,763</b>	<b>5,519,602,550</b>	<b>4,298,213</b>	<b>0.08</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,693,882	0	1,693,882	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,693,882</b>	<b>0</b>	<b>1,693,882</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,693,882</b>	<b>0</b>	<b>1,693,882</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	5,522,206,881	5,519,602,550	2,604,331	0.05
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,522,206,881</b>	<b>5,519,602,550</b>	<b>2,604,331</b>	<b>0.05</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,522,206,881</b>	<b>5,519,602,550</b>	<b>2,604,331</b>	<b>0.05</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5,523,900,763</b>	<b>5,519,602,550</b>	<b>4,298,213</b>	<b>0.08</b>

Keterangan :

FINAL

JAYAPURA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

DADANG EKO DARMINTO  
197405111999031001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2500 ) PAPUA**  
**SATUAN KERJA : ( 538129 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:34 PM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,196,360,065	11,383,281,316	(5,186,921,251)	(45.566)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,196,360,065	11,383,281,316	(5,186,921,251)	(45.566)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,196,360,065	11,383,281,316	(5,186,921,251)	(45.566)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	123,529,325	78,832,450	44,696,875	56.699
Beban Barang dan Jasa	834,904,217	757,466,042	77,438,175	10.223
Beban Pemeliharaan	165,574,936	169,034,057	(3,459,121)	(2.046)
Beban Perjalanan Dinas	636,702,546	428,567,132	208,135,414	48.565
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2500 ) PAPUA**  
**SATUAN KERJA : ( 538129 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:34 PM  
Halaman : 2  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	327,239,928	284,944,200	42,295,728	14.844
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>2,087,950,952</b>	<b>1,718,843,881</b>	<b>369,107,071</b>	<b>21.474</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,435</b>	<b>(5,556,028,322)</b>	<b>(57.489)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,435</b>	<b>(5,556,028,322)</b>	<b>(57.489)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>4,108,409,113</b>	<b>9,664,437,435</b>	<b>(5,556,028,322)</b>	<b>(57.489)</b>

---

Keterangan :

FINAL

JAYAPURA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

DADANG EKO DARMINTO  
197405111999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 2500 ) PAPUA  
SATUAN KERJA : ( 538129 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG JAYAPURA

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 12:19 PM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,519,602,550	5,652,857,697	(133,255,147)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	4,108,409,113	9,664,437,435	(5,556,028,322)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	33,878	(33,878)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	33,878	(33,878)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(4,105,804,782)	(9,797,726,460)	5,691,921,678	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,604,331	(133,255,147)	135,859,478	-
EKUITAS AKHIR	5,522,206,881	5,519,602,550	2,604,331	-

Keterangan :  
FINAL

JAYAPURA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

DADANG EKO DARMINTO  
197405111999031001